**KOP SURAT SATKER**

.........., .................... 2016

### Nomor : ..........

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : **Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara**

**Pada Mahkamah Agung RI cq. Pengadilan ..........**

Kepada Yth.

**Menteri Keuangan RI**

**up. Direktur Jenderal Kekayaan Negara**

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710

### Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan untuk tertib administrasi pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung RI, dengan ini kami mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara berupa Tanah bangunan Kantor Pemerintah, Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Pengadilan .......... sebagaimana daftar barang terlampir dengan nilai buku seluruhnya sebesar Rp .......... (.......... rupiah).

Sebagai bahan pertimbangan Saudara dalam memberikan persetujuan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dimaksud, bersama ini kami sertakan kelengkapan data/dokumen pendukung sebagai berikut :

1. Daftar Barang Milik Negara yang diusulkan untuk ditetapkan statusnya;
2. KIB Tanah dan Bangunan;
3. Gambar/foto BMN;
4. Foto Copy Sertifikat;
5. Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Sertifikat;
6. Surat Keterangan Kebenaran IMB;
7. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban IMB;
8. Laporan Barang Kuasa Pengguna;
9. Laporan Kondisi Barang Milik Negara.

### Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Barang/ Anggaran

Sekretaris Pengadilan ....................................

**(Nama)**

NIP. xxxxxxxxxx

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkmah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI;
3. Ketua Pengadilan Tinggi ........... (Tk. Banding);
4. Arsip.